

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basit, *Wawancara Pribadi Kepada KUA*, Gambut 25 November 2022, Pukul 10.00 Wita
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2013)
- Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Makassar:Humanites Genius, 2020).
- Ainaya Chindy Pratiwi “*Kepastian Hukum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Nikah Tidak Tercatat*” (2022)
- Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, Vol. 2, Jurnal Crepido*, No. 02, November 2020,
- Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV Jejak Publisher, 2018).
- Ali Akbar, *Nikah Sirri Menurut Al-Qur'an*, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. Xxii, No. 2, Juli 2014,
- Ali,Zainudin. 2018.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amanda Zubaidah Aljarofi, “*Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga*”, 2019
- Amanda Zubaidahaljarofi, *Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga*, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019),
- Aradia Alif, Yulia Rizki Amanda. 2021. *Efektifitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun2019 Di Lampung Timur*, *Syakhsiyah Jurnal Hokum Keluarga Islam*. Vol. 1, No. 1
- Arini Zubaidah,Dwi. 2019.*Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah*. *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12 No. 1.
- Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Pernikahan*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019)

- Ashadi, *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 11, No. 2, Juli 2018)
- Beni Ahmad Saebani, *Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung:Pustaka Setia, 2011)
- Daniar Syamdan, Addin dan Purwoatmodjo, Djumadi. 2019.*Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya*. Jurnal Notarius. Vol. 12 No. 1.
- Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Wanita Dan Keluarga* (Jakarta: Al Huda, 2016)
- Dewi Judiasih,Sonny.S. Dajaan,Susilowati. dan Daru Nugroho,Bambang. 2020. *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*. Jurnal Akta Diurnal. Vol. 3 No. 2.
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Kidung, “Apa Yang Dimaksud Dengan SPTJM = Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak”, <http://disdukcapil.tanatidungkab.go.id/berita/detail/apa-yang-dimaksud-dengan-sptjm--surat-pernyataan-tanggung-jawab-mutlak> diakses pada 21 September 2022 pukul 10.20 WITA
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, *Apa Yang Dimaksud Dengan Sptjm = Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak*, <http://disdukcapil.tanatidungkab.go.id/berita/detail/apa-yang-dimaksud-dengan-sptjm--surat-pernyataan-tanggung-jawab-mutlak>, Diakses pada 25 Desember 2022 pukul 14.20 WITA.
- Evie Fanny Grace Nababan, “*Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Menerbitkan Peraturan Ntentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri Dalam Rangka Percepatanpembuatan Akta Kelahiran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*”
- Evie Fanny Grace Nababan, *Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Menerbitkan Peraturan Tentang Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak*, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2018,
- Evie Fanny Grace Nababan, *Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Menerbitkan Peraturan Tentang Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak*, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2018,

- Fanny Grace Nababan, Evie. 2018. *Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Menerbitkan Peraturan Tentang Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak*. (Skripsi, Fakultas Hukum. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung).
- Fathia Amelia Rizky, Dian Septiandani, *Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Pemenuhanhak Anak*, Vol. 5, No. 2, *Jurnal USM Law Review*, 2022.
- H. Abd Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Kalimantan Selatan: Lpku)
- Hafiz Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, (Semarang: Karya Tafutra, 207-275 M)
- Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah* (Jakarta:Kencana, 2016)
- [http://www.areabaca.com/2013/8/matrik-penelitian .html](http://www.areabaca.com/2013/8/matrik-penelitian.html). Diakses pada 24 Mei 2022, Pukul 14.20 WITA.
- Ibu “Siti Hamidah” Wawancara dengan masyarakat pengguna SPTJM, 4 November 2022, pukul 10.30
- Jago Kata. Com, *Arti Kata Pasangan Menurut KBBI*, <https://jagokata.com/arti-kata/pasangan.html#:~:text=%5Bpasangan%5D%20Arti%20pasangan%20di%20KBBI,bersama%2Dsama%20sehingga%20menjadi%20sepasang>. Diakses pada 25 Desember 2022 pukul 14.00 WITA.
- Jayanti, Fitri dan Tika Arista, Nanda. 2018. *Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura*. *Jurnal Kompetensi*. Vol. 12 No. 2.
- Julir Nenang, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih*, *Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Vol. 4, No.1
- Kementrian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim”, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161 diakses pada 10 September 2022, pukul 12.30 WITA
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2).
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (1).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3) Huruf e.

M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan".

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011)

Muhammad Ain Dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Harmonis Counter Draft Kompilasi Hukum Islam Yang Kontroversial Itu*, (Jakarta: Grahacipta, 2005)

Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologipenelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2022)

Muksalmina, *Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1 No.2.

Muksalmina. 2018.*Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol. 1 No.2.

Nenan Julir, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih*, Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, (Bengkulu:2017).

Nenan Julir, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih*, Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, (Bengkulu:2017)

Nur faqih Irfani, Tesis Asas Lex Superior Lex Specialis Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum, 2020)

Observasi Awal Dengan Kepala Kua Gambut 23 September 2021 Secara Langsung Di Kua Gambut Pukul

Observasi Awal Dengan Kepala Kua Kertak Hanyar 23 September 2021 Secara Langsung Di Kua Kertak Hanyar Pukul 14.30

Observasi Awal Dengan Kepala Kua Martapura Kota 28 September 2021 Secara Langsung Di Kantor Kua Martapura Kota Pukul 11.20

Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Direktoratjenderal Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama Ri, Jakarta, 2004

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 2.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat (1) Huruf (m) tentang Persyaratan Administratif.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat (1) Huruf (a) tentang Persyaratan Administratif.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Penolakan Kehendak Nikah.

Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 9 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) tentang percepatan peningkatan cakupan akta kelahiran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 4 ayat (2).

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 2 ayat (1).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 pasal 2 ayat (1).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga Pasal 1

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (1) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat (1) Huruf (m) tentang Persyaratan Administratif.

PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1), (2) tentang Penolakan Kehendak Nikah.

Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Lambung Mangkurat, 2017.

Rodliyah, Nunung. 2013. *Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Pranata Hukum Vol. 8 No. 1.

- Safrin Salam, *Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat*, Hukum Negara & Hukum Islam, Pagaruyuang Law Journal, Vol. 1, No. 1, 2017,
- Salam, Safrin. 2017. *Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam*. Pagaruyuang Law Journal, Vol. 1, No. 1.
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7 No 2.
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Vol. 7, Yudisia, No. 2, Desember 2016,
- Septi Putri Rizkiyah, “*Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)*” (2019).
- Serly Herlianti, “*Persepsi Kepala Kua Di Kabupaten Banjar Tentang Implikasi Pencatatan Pernikahan Setelalahirnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016*”(2022)
- Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, Dan Bambang Daru Nugroho, *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*, Jurnal Akta Diurnal, Vol. 3 No. 2, 2020,
- Sukardi Paraga, *Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)*, Jurnal Pendais, Vol. 1 No.2, Desember 2019
- Syofian siregar, *Metode Pemilihan Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: KENCANA), 2017
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28e Ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) tentang perkawinan.

Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 Pasal 14.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 Pasal 1 ayat (6), tentang Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Garahamedia Press, 2014),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1946 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1952 Tentang Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan Pasal 1 Ayat (6)

Usman,Rachmadi. 2017.*Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undngan perkawinan di Indonesia*. Jurnal Lambung Mangkurat.

V.Wiratma Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta:Pt.Pustaka Baru),

Wiratma Sujarweni, V. *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta:PT.Pustaka Baru.

Yunus Ahyuni. 2020. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanites Genius).

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),

ZubaidahAljarofi,Amanda. 2019.*Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga*. (Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya).

Zulkipli, *Wawancara Pribadi Kepada Kua*, Gambut 23 September 2022, Pukul 14.00 Wita